

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku :

- Abu Daud Busroh, Pengantar Ilmu Politik, Cetakan Kelima, (Bandung : Binacipta,1974).
- Aziz Syamsuddin, Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012).
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Gafika, 1996.
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta : PSH FH UII,2002).
- Dharma Setyawansalam, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan Nilai dan Sumber Daya , (Jakarta : Djembatan, 2020).
- Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, (Jakarta : Penerbit Caplet Project, 2008).
- Djohan Effendi, Penyelenggaraan Dekonsentrasi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001).
- HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005).
- Hendra Karianga, Partisipasi Masyarakat dalam Keuangan Daerah : Perspektif Hukum dan Demokrasi, (Bandung : PT. Alumni, 2011).
- Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, (Yogyakarta : Cahaya Atmaja, 2014).
- Kementerian Hukum dan HAM, Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, (Jakarta: Dirjen Perundang-Undangan, 2011).
- King Faisal Sulaiman, Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014).
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).
- Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, (Yogyakarta : Kanisius, 2007).
- Mastorat, Pengantar Ilmu Perundang-undangan, (Surabaya : Scorpio Media

Pustaka, 2021).

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan Sinar Bhakti, 1983).

Nii'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Konsep Otonomi Daerah, (Bandung : Nusa Media, 2009)

R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo, Persada, 2007).

Roni Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982).

Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1998).

Saifudin, Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Yogyakarta : FH UII Press, 2009).

Sirajuddin, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, (Malang : Setara Press, 2016).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2004).

Sukardi, Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Daerah, (Yogyakarta : Gentha Publishing, 2016)

Suteki dan Galang Taufani, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktek), (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2018).

Syaukani, Affan Gaffar dan M. Ryass Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Kerjasama dengan_PUSKAP, 2002).

Sumber Perundang–Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Jawa Tengah

Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016 tentang Uji Materi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber dari Jurnal :

Ahmad Saleh, “Peran Serta Masyarakat Di DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah” , *Fiat Justisia : Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7, Nomor 2, Tahun 2013, halaman 223-230.

Asri Lasatu, “Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14, Nomor 2, Juli 2020, halaman 201-222.

Bambang Ariyanto, “Tertib Dasar Pembentukan Peraturan Daerah”, *Jurnal Magister Hukum Universitas Surabaya*, Volume 6, Nomor 1, Maret 2019 halaman 1035-1049.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Penyusunan Produk Hukum Daerah Harus Sesuai Peraturan Perundang- undangan”, *Sekretariat Jendral DPR RI*, Tahun 2019.

Fahmi Ramadhan Firdaus, “Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 23, Tahun 2020, halaman 282-293.

M. Pasaribu, “Metode Penelitian”, *Jurnal Hukum Universitas Medan Area*, Tahun 2015.

Muhammad Suharjono, “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 19, Februari 2014, halaman 21-37.

Sri Magdalena Hutabalian, “Peran Biro Hukum dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah”, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*”, Volume 5, Tahun 2016, halaman 74-77.

Widoyo, “Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Pekalongan”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12, Nomor 4, Tahun 2017, halaman 149-164.

Yusdiyanto, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah”, *Fiat Justisia : Jurnal Ilmu Hukum* 5, Nomor 2, Tahun 2011, halaman 66.

Sumber Data :

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah

Data Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Data Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.